

**PENGARUH PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH TERHADAP
DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN
SEMARANG DAN KOTA SALATIGA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH :
BAGUS SYARIF PANGHESTU
NIT. 22314362

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

Population growth triggers limited habitable land and slum settlements. Land Consolidation (LC) policy is implemented as a spatial planning solution. This study aims to analyze the effect of LC implementation on the social and economic impacts of the community in Penawangan Village (Semarang Regency) and Kauman Kidul Village (Salatiga City).

The research method uses an inferential quantitative approach with a sample of 78 respondents in Penawangan Village and 77 respondents in Kauman Kidul Village taken through simple random sampling. Data were collected via Likert-scale questionnaires, interviews, and observations. Data analysis was performed using instrument quality tests (validity and reliability), classic assumption tests (residual normality, linearity, heteroscedasticity), and simple linear regression analysis.

The t-test results prove that LC implementation has a positive and significant effect on social and economic impacts in both locations. Based on the coefficient of determination (R^2) analysis: (1) In Penawangan Village, LC contributes strongly by 78.6% to the social impact ($R=0.886$) and 14.4% to the economic impact ($R=0.379$); (2) In Kauman Kidul Village, LC contributes moderately by 31.9% to the social impact ($R=0.565$) and 15.3% to the economic impact ($R=0.391$). The high influence in Penawangan Village is triggered by the integration of LC with multisectoral infrastructure budgeting (Integrated DAK). It is suggested that local governments synergize LC physical planning with economic empowerment programs (access reform) to maximize the community's economic value added.

Keywords: *Land Consolidation, Social Impact, Economic Impact, Simple Linear Regression.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRACT	xv
INTISARI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kebaruan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kajian Teoretis	16
1. Kebijakan Publik	16
2. Evaluasi Kebijakan Publik	17
3. Dampak Sosial dan Ekonomi.....	19
4. Konsolidasi Tanah	26
5. Metode Penelitian Kuantitatif	34
B. Kerangka Pemikiran	38
C. Hipotesis Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Format Penelitian	42

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
1. Lokasi Penelitian	43
2. Waktu Penelitian.....	43
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	44
1. Populasi	44
2. Sampel	44
3. Teknik Pengambilan Sampel	45
D. Definisi Operasional Variabel	46
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	51
1. Jenis Data	51
2. Sumber Data.....	52
3. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Analisis Data	55
1. Uji Validitas	55
2. Uji Reliabilitas	56
3. Uji Normalitas Residual.....	56
4. Uji Linieritas	57
5. Uji Heteroskedastisitas.....	57
6. Uji Regresi Linier Sederhana.....	57
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	60
A. Profil Wilayah Kabupaten Semarang.....	60
1. Kondisi Geografis.....	60
2. Kependudukan	61
3. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	61
4. Penggunaan Tanah.....	62
5. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	62
B. Profil Wilayah Kota Salatiga	63
1. Kondisi Geografis.....	63
2. Kependudukan	65
3. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	65
4. Penggunaan Tanah.....	66
5. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	66

C. Profil Wilayah Desa Penawangan, Kab. Semarang.....	67
1. Kondisi Geografis.....	67
2. Kependudukan	69
3. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	70
4. Penggunaan Tanah.....	70
5. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	71
D. Profil Wilayah Kelurahan Kauman Kidul, Kota Salatiga.....	79
1. Kondisi Geografis.....	79
2. Kependudukan	81
3. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	81
4. Penggunaan Tanah.....	83
5. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	84
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	88
A. Hasil	88
1. Uji Validitas & Uji Reliabilitas	88
2. Uji Normalitas Residual.....	96
3. Uji Linieritas	102
4. Uji Heteroskedastisitas.....	107
5. Uji Regresi Linier Sederhana.....	111
B. Pembahasan.....	123
1. Pengaruh Pelaksanaan Konsolidasi Tanah terhadap Dampak Sosial	123
2. Pengaruh Pelaksanaan Konsolidasi Tanah terhadap Dampak Ekonomi ..	128
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat menimbulkan tantangan baru bagi kawasan permukiman. Peningkatan populasi menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap lahan sebagai tempat tinggal, sementara ketersediaan lahan yang layak huni semakin terbatas. Kondisi diatas memunculkan kawasan permukiman kumuh.¹ Permukiman kumuh menjadi salah satu fenomena umum di kota-kota besar akibat ketidakseimbangan antara tingginya permintaan tempat tinggal dan keterbatasan kemampuan kota dalam menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas umum yang memadai bagi masyarakat.² Pertumbuhan permukiman kumuh juga tampak di Jawa Tengah.³

Di Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, Arief Djatmiko, mencatat bahwa luas kawasan kumuh meningkat dari 3.004 hektar pada tahun 2018 menjadi 5.193 hektar pada tahun 2024.⁴ Peningkatan kawasan permukiman kumuh dikonfirmasi berdasarkan hasil rekapitulasi baseline data sisa luas kawasan permukiman kumuh Surat Keputusan (SK) Berkembang sampai dengan 2024 di Provinsi Jawa Tengah menurut kabupaten/kota yaitu 5.193,18 Ha. Dengan luas kawasan permukiman kumuh kurang dari 10 Ha sebesar 1.559,81 Ha; 10-15 Ha sebesar 1.292,99 Ha; dan lebih dari 15 Ha

¹ Shely Bersa Mustiana and Ratih Damayanti, 'Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Sebagai Strategi Penataan Kawasan Permukiman Studi Di Kawasan Clumprit, Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah', *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5.2 (2025), 328–37.

² Yurmansah and Mussadun, 'Evaluasi Proses Konsolidasi Tanah Kawasan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Kurau Klaster 1 Desa Kurau Berdasarkan Persepsi Masyarakat', *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 12.1 (2016), 98–111.

³ Titis Anis Fauziyah, 'Kawasan Kumuh Di Jateng Mencapai 5.203 Hektare, Terluas Di Sukoharjo', *Kompas.Com*, 2025 <<http://regional.kompas.com/read/2025/04/23/145630378/kawasan-kumuh-di-jateng-mencapai-5203-hektare-terluas-di-sukoharjo>>.

⁴ Athok Mahfud, 'Kian Meningkat, Kawasan Kumuh Di Jateng Capai 5 Ribu Hektare', *Indoraya.News*, 2025 <<https://indoraya.news/kian-meningkat-kawasan-kumuh-di-jateng-capai-5-ribu-hektare>>.

sebesar 2.887,66 Ha.⁵ Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah juga meningkat dari tahun 2018 sebesar 0.68% per tahun menjadi 0.99% per tahun di tahun 2024.⁶ Kondisi tersebut juga dialami oleh Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga yang menjadi bagian dari wilayah dengan dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat. Kabupaten Semarang memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.147 jiwa per km², sedangkan Kota Salatiga mencapai 3.661 jiwa per km².⁷ Luas kawasan kumuh di Kabupaten Semarang hingga tahun 2024 mencapai 170,62 hektar, sementara di Kota Salatiga mencapai 25,89 hektar.⁸ Kepadatan penduduk yang tinggi menjadi salah satu penyebab munculnya kawasan permukiman kumuh.⁹

Menurut Sinulingga (1999) permukiman kumuh dengan kepadatan penduduk yang tinggi umumnya mencapai 250–400 jiwa per hektar dengan ciri-ciri kondisi fisik dan lingkungan yang sangat tidak layak huni, seperti jalan lingkungan yang sempit dan sulit dilalui kendaraan roda empat, sistem drainase yang buruk hingga menyebabkan genangan saat hujan, serta fasilitas sanitasi dan pembuangan air kotor yang sangat minim dan tidak sehat karena sering langsung dibuang ke saluran atau sungai. Selain itu, ketersediaan air bersih terbatas sehingga masyarakat hanya mengandalkan sumur dangkal, air hujan, atau membeli air, tata bangunan tidak teratur dengan banyak bangunan bersifat tidak permanen atau darurat, serta kondisi lingkungan yang rawan menimbulkan berbagai penyakit.¹⁰ Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh umumnya menghadapi kondisi kehidupan yang tidak layak akibat lingkungan yang

⁵ Disperakim, *Buku Data 2024 Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan*, 2024.

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 'Laju Pertumbuhan Penduduk' <<https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi>>.

⁷ *Ibid.*

⁸ Disperakim., *Loc. cit.*

⁹ Chandra Bayu, Weni Dewi Utami, and Heri Kuswandi, 'Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Dusun Pasar Hilir Desa Sungai Ringin Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat', *Blantika: Multidisciplinary Jurnal*, 3.3 (2025), 363–71.

¹⁰ Budi D. Sinulingga, *Pembangunan Kota Tinjauan Regional Dan Lokal*, Ed 1, Cet (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

kurang sehat, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan nasional, khususnya dalam aspek ekonomi negara.¹¹ Perkembangan fisik kota yang demikian jika dibiarkan dapat memunculkan ketidakteraturan lingkungan serta bisa tumbuh permukiman liar, sehingga harus ditata agar tercipta kehidupan kota yang ATLAS (aman, tertib, lancar, asri, sehat) menuju kehidupan kota yang lestari, seimbang, optimal, dan tertata.¹²

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan proses konsolidasi tanah untuk menata kawasan kumuh tersebut menjadi kawasan yang ideal dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang tertata.¹³ Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019, konsolidasi tanah merupakan kebijakan di bidang pertanahan yang berfokus pada penataan ulang aspek penguasaan, kepemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah agar selaras dengan rencana tata ruang wilayah.¹⁴ Penataan ulang dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang sebelumnya terpecah dan tidak teratur menjadi susunan yang lebih rapi, teratur, dan fungsional. Kegiatan ini disertai dengan penyediaan lahan untuk fasilitas umum, pembangunan fisik kawasan, peningkatan kualitas lingkungan serta penertiban status penguasaan tanah melalui sertifikasi, sehingga memberikan manfaat lebih nyata kepada masyarakat.¹⁵

Konsep konsolidasi tanah memiliki manfaat yang lebih nyata dibanding dengan konsep kebijakan pertanahan lain seperti pengadaan tanah. Dibandingkan dengan mekanisme pengadaan tanah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan, keunggulan utama konsolidasi

¹¹ Inayati Safitri, N Yuliasuti, and M Maryono, 'Penguatan Modal Sosial Pada Penataan Kawasan Kumuh Kampung Gumelem Di Era Pandemi Covid- 19', *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal Ke-8 Tahun 2020*, 2020, 978–79.

¹² Tullus Subroto, Aristiono Nugroho, and Wisnuntoyo, *Evaluasi Ketersediaan Dan Penguatan Penguasaan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Purbalingga* (Yogyakarta, 2016).

¹³ B F Sihombing and others, 'Konsolidasi Tanah Yang Berkelanjutan Dalam Kebijakan Relokasi Kawasan Kumuh Analisis Empiris Yuridis', *Lex Publica*, 5.Vol. V, No. 2 (2022), 38–51.

¹⁴ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah* (Indonesia, 2019), pp. 1–59.

¹⁵ Hery Budiyanto, 'Manfaat Penggunaan Metoda Konsolidasi Tanah', *Mintakat, Jurnal Arsiterktur*, Vol 2 No.1 (2003).

tanah adalah proses penyediaan tanah untuk pembangunan dilakukan tanpa melalui pembebasan atau penggusuran. Melalui pendekatan ini, pemilik tanah tetap memperoleh kembali hak atas tanahnya dalam bentuk bidang yang telah tertata, disertai peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dengan demikian, konsolidasi tanah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyediaan tanah, tetapi menekankan keteraturan tata ruang dan perbaikan kualitas lingkungan melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung secara bersama-sama, serta melibatkan warga sebagai peserta aktif dalam prosesnya sehingga meningkatkan rasa keadilan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah yang dikonsolidasi.

Sebaliknya, pengadaan tanah dilaksanakan melalui mekanisme pelepasan atau pembebasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah. Meskipun mekanisme ini memberikan kompensasi finansial, dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan seperti ketidaksepakatan atas besaran ganti kerugian, potensi konflik sosial, serta keberlanjutan pemanfaatan ruang yang kurang terintegrasi dengan tata ruang wilayah secara makro. Selain itu, pengadaan tanah bersifat transaksional karena hubungan antara pemilik tanah dan tanahnya berakhir setelah pemberian ganti kerugian, berbeda dengan konsolidasi tanah yang tetap mempertahankan hubungan kepemilikan sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang dan keteraturan bidang tanah secara lebih berkelanjutan. Dengan demikian, konsolidasi tanah menawarkan keunggulan sebagai alternatif pengadaan tanah yang dinilai tidak hanya lebih partisipatif, tetapi juga dapat menciptakan struktur ruang yang lebih tertata dan efisien melalui *output* fisik penataan lingkungan dan penyediaan infrastruktur permukiman hasil pelaksanaannya di lapangan.¹⁶

Sebagai contoh pelaksanaan konsolidasi tanah pada kawasan kumuh di Kampung Jlagran, Kota Yogyakarta menghasilkan *output* fisik berupa penataan lingkungan permukiman yang lebih teratur melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan

¹⁶ Isabela Candrakirana, Oloan Sitorus, and Widhiana Hestining Puri, 'Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum', *Jurnal Bhumi*, 2014.

lingkungan, talud, sistem sanitasi dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta fasilitas mitigasi bencana, yang mendorong terciptanya lingkungan hunian yang lebih bersih, nyaman, dan layak huni. Perilaku dan budaya masyarakat juga berubah, ditandai dengan meningkatnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, ditinggalkannya kebiasaan membuang limbah ke sungai, membaiknya interaksi sosial antarwarga, serta mulai terkikisnya stigma negatif terhadap kawasan permukiman tersebut.¹⁷ Selain itu, studi di Kelurahan Kalipancur, Kota Semarang juga menghasilkan *output* berupa peningkatan kepastian hukum melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah sehingga menambah nilai ekonomi serta kenaikan harga tanah sebagai dampak dari tertatanya lingkungan permukiman.¹⁸ Hal tersebut senada dengan harapan warga Kampung Bugisan, Pekalongan, bahwa program Konsolidasi Tanah, selain untuk penanganan banjir rob (pasang air laut) dan perbaikan lingkungan, juga dapat meningkatkan harga tanah seiring dengan pembangunan utilitas dan perbaikan lingkungan.¹⁹

Sebagai perbandingan internasional, pelaksanaan *Land Readjustment* (LR) di Jepang menunjukkan keberhasilan yang serupa dalam penataan kawasan perkotaan. LR di Jepang telah digunakan secara luas untuk pengembangan kawasan baru maupun rekonstruksi wilayah pascabencana, dengan mekanisme penataan kembali bidang tanah tanpa melalui pembebasan secara menyeluruh. Melalui sistem ini, sebagian kecil tanah peserta dikontribusikan untuk pembangunan jalan, taman, dan fasilitas umum, serta sebagian dialokasikan sebagai *reserve land* (tanah cadangan hasil pengurangan proporsional bidang peserta) untuk pembiayaan proyek. Setelah proses selesai, pemilik tanah menerima

¹⁷ Martina Aberta and others, 'Konsolidasi Tanah Kasultanan Dalam Program Peremajaan Permukiman Kumuh Di Kampung Jlagran, Kota Yogyakarta', *Jurnal Pertanahan*, Vol. 14 No. November (2024), 109–30.

¹⁸ Wuri Mulyanti, 'Pengaruh Konsolidasi Lahan Perkotaan Terhadap Harga Tanah Di Ringintelu , Kelurahan Kalipancur - Kota Semarang', *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11.1 (2015), 63–75.

¹⁹ Elsa Widura, Asih Retno Dewi, and Wijayanti Hapsari, 'Land Consolidation Policy in Addressing Slums and Tidal Flooding: A Case Study of Kampung Bugisan', *The Journal Of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6.1 (2025), 67–83 <<https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i1.584>>.

kembali bidang tanah yang telah tertata dengan akses infrastruktur yang lebih baik dan nilai ekonomi yang meningkat. Penerapan LR di Jepang terbukti mampu meningkatkan keteraturan tata ruang, memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan secara berkelanjutan, sekaligus mempertahankan hak kepemilikan masyarakat atas tanahnya.²⁰ Berbagai *output* tersebut menunjukkan bahwa konsolidasi tanah menghasilkan perubahan fisik dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, namun keberhasilannya perlu dikaji lebih lanjut bagaimana *output* tersebut bisa menjadi *outcome* melalui dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Keberhasilan program konsolidasi tanah tidak cukup hanya diukur dari *output* fisik, namun juga harus dilihat dari dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia secara normatif telah ditegaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Peraturan ini menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) yang memuat secara jelas keterkaitan antara program, kegiatan, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), serta indikator kinerja yang terukur, sebagai dasar penilaian keberhasilan belanja negara. Jadi, setiap perencanaan anggaran perlu menjelaskan keterkaitan yang jelas antara besaran biaya yang dialokasikan dengan hasil yang diharapkan dari pengeluaran pemerintah, di mana kegiatan (*activities*) yang dibiayai harus menghasilkan keluaran (*output*), dan akumulasi dari berbagai keluaran tersebut dalam suatu program selanjutnya berkontribusi terhadap pencapaian hasil (*outcome*) yang ditetapkan. Dengan demikian, secara regulatif, PMK Nomor 62 Tahun 2023 menempatkan *outcome* sebagai elemen kunci dalam perencanaan dan evaluasi anggaran, yang menuntut adanya pengukuran dampak kebijakan untuk memastikan bahwa

²⁰ Felipe Francisco De Souza, 'The Successful Extensive Use of Land Readjustment in Japan'.

pelaksanaan anggaran benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan dan prinsip akuntabilitas keuangan negara.²¹

Hasil (*outcome*) dari pelaksanaan konsolidasi tanah merupakan kelanjutan dari *output* yang dihasilkan, di mana penataan lingkungan mendorong terjadinya dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dampak sosial meliputi perubahan pola interaksi masyarakat, peningkatan kualitas hunian, serta penguatan kepedulian terhadap lingkungan.²² Sementara itu, dampak ekonomi tercermin melalui peningkatan nilai tanah, munculnya peluang usaha baru, serta kenaikan pendapatan rumah tangga pasca pelaksanaan konsolidasi tanah.²³ Dengan demikian, mengkaji dampak sosial dan ekonomi menjadi penting untuk mengukur sejauh mana program konsolidasi tanah benar-benar memberi manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, diperlukan kajian pada lokasi yang telah menunjukkan capaian nyata serta memiliki potensi pengembangan konsolidasi tanah secara berkelanjutan.

Kajian nyata keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah terlihat di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah di Kabupaten Semarang, khususnya dalam penanganan permukiman kumuh menjadi alasan kuat untuk memilih Kabupaten Semarang sebagai lokasi penelitian. Program ini dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menunjukkan intervensi pemerintah secara langsung dan bukan berbasis swadaya masyarakat. Objek konsolidasi yang ditata merupakan lahan non pertanian berupa kawasan permukiman, yang difokuskan pada penataan kembali bidang tanah serta pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas umum. Selain menunjukkan perubahan fisik kawasan yang signifikan, Kabupaten Semarang juga dinilai mampu merepresentasikan praktik konsolidasi tanah yang terintegrasi,

²¹ Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan*, 2023.

²² Aberta and others., *Loc. cit.*

²³ Mulyanti. *Loc. cit.*

²⁴ Aberta and others., *Loc. cit.*

berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga relevan sebagai studi penelitian.²⁵

Demikian pula di Kota Salatiga, pelaksanaan konsolidasi tanah menunjukkan dampak nyata dalam penataan ruang dan peningkatan kualitas permukiman serta fungsi lahan. Konsolidasi tanah di Kelurahan Kauman Kidul, yang merupakan *pilot project* reforma agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN dan dukungan pemangku kebijakan daerah, berhasil menata kembali bidang tanah non pertanian sesuai rencana tata ruang sekaligus menghasilkan infrastruktur seperti pelebaran jalan lingkungan, jaringan irigasi, dan bidang tanah pertanian untuk pengembangan agrowisata berbasis partisipasi masyarakat, yang menunjukkan keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program tersebut.²⁶ Selain itu, studi menunjukkan bahwa konsolidasi tanah di Salatiga juga dipandang sebagai contoh praktik yang baik dengan dampak positif berupa optimalisasi penggunaan lahan serta keteraturan ruang, sehingga layak dijadikan lokus penelitian yang representatif untuk melihat dampak sosial dan ekonomi dari konsolidasi tanah di kawasan perkotaan dan semi perkotaan.²⁷ Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga juga memiliki karakteristik program konsolidasi tanah yang berbeda, baik dari segi tujuan, tipologi kawasan, maupun latar belakang sosial masyarakat, sehingga relevan dijadikan lokasi studi penelitian. Pemilihan dua wilayah ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai variasi dampak sosial dan ekonomi konsolidasi tanah.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa dampak pelaksanaan konsolidasi tanah pada berbagai lokasi penelitian menunjukkan variasi yang signifikan, yang dipengaruhi oleh perbedaan konteks wilayah serta

²⁵ Yusuf Assidiq, 'Hapus "Stempel" Kumuh Desa Penawangan, Begini Upaya Kementerian ATR/BPN', *Republik*, 2023 <<https://rejogja.republika.co.id/berita/rvxsts399/hapus-stempel-kumuh-desa-penawangan-begini-upaya-kementerian-atrbpn>>.

²⁶ Agus AP, 'Tuntaskan Reforma Agraria Di Kauman Kidul', *Jawa Pos*, 2021 <<https://radarsemarang.jawapos.com/salatiga/721375932/tuntaskan-reforma-agraria-di-kauman-kidul>>.

²⁷ Hadi Arnowo, 'Konsolidasi Tanah Untuk Optimalisasi Tanah Pertanian Berskala Kecil (Studi Kasus Di Kota Salatiga)', *Jurnal Tunas Agraria*, 5.1 (2022), 1–16.

karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai dampak sosial dan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat dengan adanya program konsolidasi tanah, sehingga penelitian berjudul **“Pengaruh Pelaksanaan Konsolidasi Tanah terhadap Dampak Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga”** telah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan program ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan pertanahan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kajian dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh pelaksanaan konsolidasi tanah terhadap dampak sosial dan ekonomi masyarakat di lokasi studi yang berbeda. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan konsolidasi tanah terhadap dampak sosial masyarakat di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga?
2. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan konsolidasi tanah terhadap dampak ekonomi masyarakat di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga?

C. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini diperlukan untuk membatasi ruang lingkup dan fokus penelitian, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun batasan yang ditetapkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. penelitian ini berfokus pada dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat pada pelaksanaan konsolidasi tanah;

2. penelitian ini dilakukan pada pelaksanaan konsolidasi tanah di dua lokasi yakni di Desa Penawangan Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang dan di Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
3. penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif inferensial dengan analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh pelaksanaan konsolidasi tanah terhadap dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Analisis data mencakup statistik inferensial berupa uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas residual, uji linieritas, uji heteroskedastisitas serta uji regresi linier sederhana.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai sebagai dasar dalam menganalisis dampak sosial dan ekonomi masyarakat di kedua lokasi pada pelaksanaan konsolidasi tanah. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis besarnya pengaruh pelaksanaan konsolidasi tanah terhadap dampak sosial masyarakat di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga;
2. menganalisis besarnya pengaruh pelaksanaan konsolidasi tanah terhadap dampak ekonomi masyarakat di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a) dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pertanahan, khususnya terkait analisis kebijakan konsolidasi tanah dengan pendekatan kuantitatif inferensial berbasis korelasional;

- b) dapat memperkaya referensi akademik mengenai keterkaitan antara pelaksanaan konsolidasi tanah dengan dampak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari evaluasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a) bagi pemerintah dan instansi terkait, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan serta pengembangan kebijakan konsolidasi tanah di masa mendatang;
- b) bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai dampak sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di lokasi penelitian

F. Kebaruan Penelitian

Untuk memperdalam pemahaman dan memperjelas fokus penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan dijabarkan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Kebaruan Penelitian

No	a. Nama Peneliti; b. Tahun Penelitian; c. Judul Penelitian; d. Afiliasi.	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Gap
1	a. Hariz Fakhri, Winny Astuti, Isti Andini; b. 2023; c. <i>Penataan</i>	Metode penelitian menggunakan pendekatan	1. Penataan permukiman kumuh dilakukan melalui perbaikan	Penelitian terdahulu hanya meninjau dampak penataan

	<i>Permukiman Kumuh di Kawasan HP 00001 Kelurahan Mojo dan Dampaknya terhadap Kualitas Hidup Masyarakat;</i> d. Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman, Universitas Sebelas Maret Surakarta.	deskriptif dengan indikator sosial dan lingkungan.	fisik lingkungan, peningkatan aksesibilitas, dan penataan hunian masyarakat. 2. Penataan permukiman kumuh berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dari aspek lingkungan fisik dan kenyamanan tempat tinggal.	permukiman dari aspek fisik, terbatas pada lingkungan dan kenyamanan hunian. Belum mengkaji dampak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan program penataan lahan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat pelaksanaan konsolidasi tanah.
2	a. Asyri Febriana, Nakzim Khalid Siddiq, Lanang Sakti; b. 2022; c. <i>Analisis Dampak Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan</i>	Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan	1. Konsolidasi tanah digunakan sebagai instrumen penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Pelaksanaan konsolidasi	Penelitian terdahulu berfokus pada dampak lingkungan dan aspek hukum, tanpa menelaah dampak sosial dan ekonomi

	<i>n Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak);</i> d. Jurnal Fundamental Justice, Universitas Bumigora Mataram.	konseptual .	tanah menimbulkan dampak lingkungan berupa perubahan tata guna lahan dan potensi degradasi lingkungan akibat lemahnya pengendalian pembangunan.	yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penelitian ini memperluas lingkup kajian dengan menganalisis dampak sosial dan ekonomi masyarakat secara kuantitatif.
3	a. Martina Aberta, Tanjung Nugroho, M. Nur Kamila Amrullah, Eko Suharto; b. 2024; c. <i>Konsolidasi Tanah Kasultanan dalam Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Jlagran;</i> d. Jurnal Pertanahan, Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan	Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif.	1. Konsolidasi tanah Kasultanan dilaksanakan melalui pengaturan ulang penguasaan tanah dan penataan kawasan permukiman kumuh. 2. Pelaksanaan konsolidasi tanah memberikan dampak sosial dan ekonomi positif bagi masyarakat, seperti meningkatnya rasa keadilan dan nilai lahan, meskipun belum diukur	Penelitian terdahulu telah membahas dampak sosial dan ekonomi, namun masih bersifat kualitatif dan deskriptif serta menilai dampak dalam jangka pendek (1-2 tahun), sehingga belum mengukur besar dan signifikansi pengaruh pelaksanaan konsolidasi tanah.

			secara kuantitatif.	Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi linier sederhana dan mengevaluasi dampak dalam 3-5 tahun.
4	a. Yang Zhou et al.; b. 2025; c. <i>Socio-economic impacts, challenges, and strategies for whole-region comprehensive land consolidation</i> ; d. <i>Jurnal Land Use Policy</i>, Elsevier Ltd.	Menggunakan metode cost-benefit analysis dan survei persepsi masyarakat.	1. Konsolidasi tanah skala wilayah meningkatkan kohesi sosial dan kualitas hidup masyarakat secara regional. 2. Konsolidasi tanah meningkatkan efisiensi ekonomi dan pendapatan masyarakat secara makro. 3. Tantangan utama meliputi pembiayaan dan partisipasi masyarakat, dengan strategi kebijakan terpadu sebagai	Penelitian terdahulu dilakukan pada skala regional dan nasional di Tiongkok dengan pendekatan kebijakan makro. Belum mengkaji dampak sosial dan ekonomi pada skala lokal berbasis persepsi masyarakat. Penelitian ini menutup celah tersebut dengan mengkaji konteks lokal perkotaan-perdesaan di

			solusi.	Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.
5	a. Walter Timo de Vries; b. 2022; c. <i>Social Aspects in Land Consolidation Processes</i> ; d. Jurnal <i>Land, Multidisciplinary Digital Publishing Institute</i> (MDPI).	Metode menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis situasional .	1. Aspek sosial seperti keadilan, partisipasi, dan pengakuan masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses konsolidasi tanah.	Penelitian terdahulu bersifat konseptual dan teoritis, tanpa pengujian empiris terhadap dampak sosial maupun ekonomi. Penelitian ini mengembangkan konsep tersebut menjadi pengukuran empiris dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat pelaksanaan konsolidasi tanah.

Sumber: Analisis Peneliti, 2026

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Pelaksanaan Konsolidasi Tanah terhadap Dampak Sosial dan Dampak Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pelaksanaan Konsolidasi Tanah terhadap Dampak Sosial

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dampak Sosial masyarakat di kedua lokasi penelitian. Jawaban atas seberapa besar pengaruhnya dapat dilihat dari nilai Koefisien Determinasi (R^2) masing-masing wilayah:

a) Desa Penawangan, Kabupaten Semarang

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,786 menunjukkan bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah memberikan kontribusi pengaruh yang sangat besar, yaitu 78,6% terhadap perubahan dampak sosial masyarakat. Keeratan hubungan antarvariabel ini masuk dalam kategori Sangat Kuat ($R=0,886$). Dampak sosial paling nyata terlihat dari kuatnya modal sosial dan budaya gotong royong warga dalam menyumbangkan tanah demi pelebaran jalan melalui forum musyawarah mufakat. Selain itu, transformasi aksesibilitas lingkungan yang mempermudah mobilitas roda empat dan kendaraan darurat, serta perubahan perilaku masyarakat dari membuang sampah ke sungai menjadi tertib mengelola limbah domestik berkat fasilitas drainase dan TPS3R dari DAK Integrasi.

b) Kelurahan Kauman Kidul, Kota Salatiga

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,319 menunjukkan bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah memberikan kontribusi pengaruh sebesar 31,9% terhadap dampak sosial masyarakat,

dengan tingkat keeratan hubungan dalam kategori Sedang ($R=0,565$). Dampak sosial yang paling dirasakan adalah terbukanya akses jalan bagi warga yang semula terisolasi (*landlocked*) berkat kerelaan tetangga sekitar dalam berbagi lahan. Selain itu, penataan ini sukses menumbuhkan budaya bersih dan mengubah gaya hidup masyarakat menuju kawasan agrowisata yang tetap menjaga kelestarian fungsi lahan pertanian.

2. Pengaruh Pelaksanaan Konsolidasi Tanah terhadap Dampak Ekonomi
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dampak Ekonomi masyarakat di kedua lokasi penelitian. Besarnya kontribusi pengaruh berdasarkan analisis Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

- a) Desa Penawangan, Kabupaten Semarang

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,144 menunjukkan bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah berkontribusi sebesar 14,4% terhadap dampak ekonomi, dengan tingkat hubungan dalam kategori Rendah/Lemah ($R=0,379$). Dampak ekonomi paling nyata dialami masyarakat melalui lonjakan harga jual tanah hingga dua kali lipat akibat perbaikan infrastruktur jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya dari DAK Integrasi. Meskipun sertipikat memberikan kepastian hukum, mayoritas warga memilih tidak memanfaatkan akses pinjaman modal ke bank karena merasa kebutuhan saat ini sudah tercukupi. Selain itu, perkembangan peluang usaha baru masih sangat terbatas karena sebagian besar masyarakat tetap mempertahankan profesi awal mereka sebagai petani dan buruh.

- b) Kelurahan Kauman Kidul, Kota Salatiga

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,153 menunjukkan bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah memberikan pengaruh sebesar 15,3% terhadap aspek ekonomi masyarakat, dengan tingkat hubungan kategori Rendah/Lemah ($R=0,391$). Di lokasi

ini, dampak ekonomi tidak hanya dirasakan melalui legalitas hukum sertipikat yang banyak dimanfaatkan warga untuk mengakses pinjaman modal di bank, melainkan juga melalui terbukanya peluang usaha dan tambahan penghasilan baru dari sektor pariwisata. Transformasi aksesibilitas pasca konsolidasi tanah berhasil melahirkan Kawasan Wisata Sitalang (*jogging track*, agrowisata, dan *river tubing*) yang secara langsung menghidupkan dan menggerakkan perekonomian warung-warung milik warga setempat.

Tingginya angka pengaruh pelaksanaan konsolidasi tanah terhadap dampak sosial dan ekonomi di Desa Penawangan dibandingkan di Kelurahan Kauman Kidul disebabkan oleh adanya integrasi program DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK Integrasi) yang mencakup pemugaran kawasan secara menyeluruh, termasuk pembangunan infrastruktur lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase, IPAL, dan fasilitas TPS3R. Sebaliknya, pelaksanaan program di Kelurahan Kauman Kidul menunjukkan pengaruh yang lebih rendah karena fokus secara umum bersifat terbatas pada legalisasi aset tanah melalui sertipikasi serta pembukaan akses jalan lingkungan bagi bidang-bidang tanah warga yang semula terisolasi (*landlocked*). Dengan demikian, integrasi kebijakan pertanahan dengan pendanaan infrastruktur multisektoral terbukti secara signifikan memperkuat capaian dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Mengingat pengaruh Konsolidasi Tanah terhadap dampak ekonomi di kedua lokasi masih relatif rendah jika dibandingkan dengan dampak sosial, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program konsolidasi tanah dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan UMKM, pemberian stimulus usaha baru, atau pengembangan potensi pariwisata lokal agar nilai tambah ekonomi tanah pasca penataan dapat termaksimalkan.

2. Bagi Kantor Pertanahan

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, yang secara struktural membawahi pelaksanaan Konsolidasi Tanah, diharapkan dapat membangun koordinasi dan sinergi lintas seksi secara aktif dengan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Koordinasi ini bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan program pemberdayaan hak atas tanah masyarakat (*access reform*) pasca pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat hasil penelitian menunjukkan kontribusi pengaruh Konsolidasi Tanah terhadap aspek ekonomi masyarakat masih relatif lebih rendah dibandingkan dampak sosialnya. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan melalui program pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan ke lembaga keuangan, serta pelatihan peningkatan kapasitas ekonomi, sehingga kemanfaatan program Konsolidasi Tanah dapat dirasakan secara komprehensif baik dari segi tata ruang fisik maupun peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat setempat.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat terus mempertahankan budaya gotong-royong serta terlibat secara aktif dalam setiap musyawarah penataan lingkungan, mengingat partisipasi aktif tersebut terbukti menjadi kunci utama tingginya capaian kepuasan dampak sosial di lapangan. Di samping itu, kesadaran dalam pemanfaatan legalitas hukum juga perlu ditingkatkan. Sertipikat hak atas tanah yang diperoleh sebagai hasil dari program Konsolidasi Tanah sebaiknya digunakan secara bijak dan produktif, salah satunya sebagai agunan untuk mengakses modal usaha, guna menghindari pemanfaatan untuk kegiatan konsumtif yang berisiko tinggi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan menambahkan variabel independen lain di luar model ini, seperti tingkat pendapatan awal, tingkat pendidikan, efektivitas

sosialisasi, atau peran kelembagaan desa, mengingat masih terdapat sisa pengaruh luar yang cukup besar yang belum terungkap pada model dampak ekonomi. Selain itu, peneliti selanjutnya menerapkan metode lain seperti metode penelitian komparatif kuantitatif (*causal-comparative*) atau metode kombinasi (*mixed methods*) yang secara khusus membandingkan efektivitas pelaksanaan Konsolidasi Tanah di antara dua lokasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aberta, Martina, Tanjung Nugroho, M Nur Kamila Amrullah, and Eko Suharto, 'Konsolidasi Tanah Kasultanan Dalam Program Peremajaan Permukiman Kumuh Di Kampung Jlagran, Kota Yogyakarta', *Jurnal Pertanahan*, Vol. 14 No.November (2024), 109–30
- Adam, M. Nuryadin, 'Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jembatan Kandilo Bagi Warga Desa Sungai Tuak Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur' (Universitas Gajah Mada, 2013)
- Akhmad, Nanang Kurniawan, 'Dampak Pandemi Covid-19 Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Di Desa Moolo Indah Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)' (Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2021) <<https://digilib.iainkendari.ac.id/3497/>>
- Al'Auni, Khofifah, Tri Sabiru, and Hadi Saputra Panggabean, 'Uji Signifikansi Distribusi T', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4.2 (2025), 3283–92
- AP, Agus, 'Tuntaskan Reforma Agraria Di Kauman Kidul', *Jawa Pos*, 2021 <<https://radarsemarang.jawapos.com/salatiga/721375932/tuntaskan-reforma-agraria-di-kauman-kidul>>
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Ariyanti, Dwi Ning, and Supratiwi, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengentasan Permukiman Kumuh Melalui Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi Di Desa Penawangan', *Journal of Politic and Government Studies*, 2022, 1–12
- Arnowo, Hadi, 'Konsolidasi Tanah Untuk Optimalisasi Tanah Pertanian Berskala Kecil (Studi Kasus Di Kota Salatiga)', *Jurnal Tunas Agraria*, 5.1 (2022), 1–16
- Assidiq, Yusuf, 'Hapus “Stempel” Kumuh Desa Penawangan, Begini Upaya Kementerian ATR/BPN', *Republik*, 2023 <<https://rejogja.republika.co.id/berita/rvxsts399/hapus-stempel-kumuh-desa-penawangan-begini-upaya-kementerian-atrbpn>>
- Auliya, Nur Hikmatul, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari

- Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and others, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, ed. by Husnu Abadi (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020)
- Azhari, Ervina, La Mohamat Saleh, and Meyke Marantika, 'Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Dan Perpustakaan Man 1 Maluku Tengah', *Journal Agregate*, 2.2 (2023), 262–70
- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, *Laporan Akhir Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2022* (Kabupaten Semarang, 2022)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2026*, ed. by BPS Kabupaten Semarang (Kabupaten Semarang: BPS Kabupaten Semarang, 2026)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, *Kecamatan Pringapus Dalam Angka 2025*, ed. by BPS Kabupaten Semarang (Kabupaten Semarang: BPS Kabupaten Semarang, 2025)
- Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, *Kota Salatiga Dalam Angka 2026*, ed. by BPS Kota Salatiga (Kota Salatiga: BPS Kota Salatiga, 2026), XLV
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 'Laju Pertumbuhan Penduduk' <<https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi>>
- Badriyah, Laelatul, 'Kajian Dampak Sosial Ekonomi Dan Strategi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dari Adanya Taman Kota Di Kota Semarang' (Universitas Negeri Semarang, 2018)
- Bayu, Chandra, Weni Dewi Utami, and Heri Kuswandi, 'Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Dusun Pasar Hilir Desa Sungai Ringin Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat', *Blantika: Multidisciplinary Jurnal*, 3.3 (2025), 363–71
- Budiyanto, Hery, 'Manfaat Penggunaan Metoda Konsolidasi Tanah', *Mintakat, Jurnal Arsitektur*, Vol 2 No.1 (2003)

- Candrakirana, Isabela, Oloan Sitorus, and Widhiana Hestining Puri, 'Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum', *Jurnal Bhumi*, 2014
- Darwin, Muhammad, Marianne Reynelda Mamondol, Salman Alparis Sormin, Yuliana Nurhayati, Hardi Tambunan, Diana Sylvia, and others, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, ed. by Taman Sony Tambunan (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021)
- de Soto, Hernando, *The Mystery of Capital* (New York: Basic Books, 2000)
- Dewi, Fitria, Puspita Anggraini, Vilda Ana, Veria Setyawati, Universitas Dian, and Nuswantoro Semarang, 'Pembelajaran Statistika Menggunakan Software SPSS Untuk Uji Validitas Dan Reliabilitas', *Jurnal Basicedu*, 6.4 (2022), 6491–6504
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang, *Potensi & Peluang Investasi Kabupaten Semarang* (Kabupaten Semarang, 2024)
<<https://www.dpmptspsemarangkab.com/img/profilinvestasi.pdf>>
- Direktorat Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, *Buku Profil Konsolidasi Tanah Tahun 2019* (Jakarta, 2019)
- Disperakim, *Buku Data 2024 Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan*, 2024
- Fadli, Naufal Nur, 'Implementasi Program Konsolidasi Tanah Pada Kawasan Permukiman Kumuh Di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang' (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2024)
- Fauziyah, Titis Anis, 'Kawasan Kumuh Di Jateng Mencapai 5.203 Hektare, Terluas Di Sukoharjo', *Kompas.Com*, 2025
<<http://regional.kompas.com/read/2025/04/23/145630378/kawasan-kumuh-di-jateng-mencapai-5203-hektare-terluas-di-sukoharjo>>
- Field, Andy, *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*, 5th ed. (Sage Publications, 2018)
- Geertz, Clifford, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1963)

- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi 9 (Badan Penerbit - UNDIP, 2018)
- Granovetter, Mark, 'Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness', *American Journal of Sociology*, Vol.91, No (1985) <<https://www.jstor.org/stable/2780199>>
- Habermas, Jürgen, *The Theory of Communicative Action* (Boston: Beacon Press, 1984)
- Hanief, Yulingga Nanda, and Wasis Himawanto, *Statistik Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Junaedi, 'Menteri ATR/BPN Bagikan Sertifikat Konsolidasi Tanah Di Penawangan', *Portal Informasi Warga Jateng*, 2022 <<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/menteri-atr-bpn-bagikan-sertifikat-konsolidasi-tanah-di-penawangan/>>
- Kanda Data, 'How to Choose a 5% or 10% Margin of Error in Slovin's Formula | Calculating the Minimum Sample Size', 2024 <<https://kandadata.com/how-to-choose-a-5-or-10-margin-of-error-in-slovins-formula/>>
- Karmilasari, 'Dampak Ekonomi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Rumah Sakit Di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone' (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023)
- Kelurahan Kauman Kidul, *Buku Profil Kelurahan Kauman Kidul* (Kota Salatiga, 2024)
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah* (Indonesia, 2019), pp. 1–59
- Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan*, 2023
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *JEDI: Jejak DAK Integrasi* (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024) <<https://www.dakintegrasi.com/home>>
- Lefebvre, Henri, *The Production of Space*, ed. by Donald Nicholson-Smith

- (Oxford: Blackwell, 1991)
- Likert, Rensis, *A Technique for the Measurement of Attitudes*, ed. by R.S. Woodworth (New York: Archives of Psychology, 1932)
- Lubis, Tona Aurora, and Firmansyah, *Dampak Sosial Ekonomi BUMDesa* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019)
- Magdalena, Novita, 'Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Pasca Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta Terhadap Kehidupan Masyarakat Bagi Pemuda Dan Pemudi Di Desa Glagah Kabupaten Kulonprogo', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.1 (2022), 1103–10
- Mahfud, Athok, 'Kian Meningkat, Kawasan Kumuh Di Jateng Capai 5 Ribu Hektare', *Indoraya.News*, 2025 <<https://indoraya.news/kian-meningkat-kawasan-kumuh-di-jateng-capai-5-ribu-hektare>>
- Margana, Marina Sylvia, M. Abdul Aziz Ramdhani, M. Faizal Gitsni, M. Rizki Haikal Kamil, Nahla Galuh Sandrina, and Mia Lasmi Wardiyah, 'Pengaruh Statistik Inferensial Dalam Pengambilan Keputusan Investasi', 3.1 (2024), 1307–14
- Mulyanti, Wuri, 'Pengaruh Konsolidasi Lahan Perkotaan Terhadap Harga Tanah Di Ringintelu , Kelurahan Kalipancur - Kota Semarang', *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11.1 (2015), 63–75
- Mustiana, Shely Bersa, and Ratih Damayanti, 'Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Sebagai Strategi Penataan Kawasan Permukiman Studi Di Kawasan Clumprit, Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah', *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5.2 (2025), 328–37
- Nurdin, I, Sugiman, and Sunarmi, 'Penerapan Kombinasi Metode Ridge Regression (RR) Dan Metode Generalized Least Square (GLS) Untuk Mengatasi Masalah Multikolinearitas Dan Autokorelasi', *Jurnal MIPA*, 41.1 (2018), 58–68
- Nursalikah, Ani, 'Sejahterakan Petani Kauman Kidul Dengan Agrowisata', *Republika Online*, 2018 <<https://republika.co.id/berita/bpn/berita-bpn/18/05/17/p8uqsw366-sejahterakan-petani-kauman-kidul-dengan-agrowisata>>
- Octavianto, Adi Wibowo, 'Strukturasi Giddens Dan Social Construction Of

- Technology (Scot) Sebagai Pisau Analisis Alternatif Penelitian Sosial Atas Teknologi Media Baru', VI (2014), 41–57
- Pemerintah Kabupaten Semarang, *Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2023-2043* (Indonesia, 2023)
- Pemerintah Kota Salatiga, *Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043* (Indonesia, 2023)
- Pemerintah Kota Salatiga, *Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III, Dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030* (Indonesia, 2018)
- Pemerintah Kota Salatiga, *Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga 2024-2044* (Indonesia, 2024)
- Permana, Adrian, Ayu Maulida, Fahri Husaeni, Hawa Mujadidah A, Salsabila Ruhimasari, and Paris Pajar Surya, 'Jurnal Penelitian Nusantara Definisi Kebijakan Publik : Pengertian , Unsur-Unsur Dan Perkembangan Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara Unsur Yang Membentuk Definisi Kebijakan Publik', *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1 (2025), 453–57
- Purwanto, Rahmat Dwi, 'Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal Di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim' (Universitas Sriwijaya, 2015)
- Putnam, Robert D., *Summary of 'Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community'*, ed. by Simon & Schuster (New York, 2000)
<<https://www.beyondintractability.org/bksum/putnam-bowling>>
- Putra, Windra, Winarno, and Rianita Puspa Sari, 'Analisis Pengaruh Periklanan Mobile Terhadap Loyalitas Konsumen Kartu Prabayar XL Karawang', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.6 (2022)
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.6446981>>
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945* (Indonesia, 1945)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan*

- Dan Kawasan Permukiman* (Indonesia, 2011)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun* (Indonesia, 2011)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang* (Indonesia, 2007)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (Indonesia, 1960)
- Risyaputra, Nadhif Zufar, ‘Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi’ (Universitas Gajah Mada, 2023)
- Safitri, Inayati, N Yuliasuti, and M Maryono, ‘Penguatan Modal Sosial Pada Penataan Kawasan Kumuh Kampung Gumelem Di Era Pandemi Covid- 19’, *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal Ke-8 Tahun 2020*, 2020, 978–79
- Santoso, Aprih, and Emaya Kurniawati, ‘Kajian Land Value Capture Kota Semarang’, *Jurnal Riptek*, 6.1 (2022), 53–58
- Sihombing, B F, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, and Universitas Internasional Batam, ‘Konsolidasi Tanah Yang Berkelanjutan Dalam Kebijakan Relokasi Kawasan Kumuh Analisis Empiris Yuridis’, *Lex Publica*, 5.Vol. V, No. 2 (2022), 38–51
- Simorangkir, Maurit, ‘Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo’ (Universitas Gajah Mada, 2022)
- Sinulingga, Budi D., *Pembangunan Kota Tinjauan Regional Dan Lokal*, Ed 1, Cet (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999)
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
- Souza, Felipe Francisco De, ‘The Successful Extensive Use of Land Readjustment in Japan’
- Subroto, Tullus, Aristiono Nugroho, and Wisnuntoyo, *Evaluasi Ketersediaan Dan Penguatan Penguasaan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Purbalingga* (Yogyakarta, 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaitaif Dan R&D* (Bandung:

Alfabeta, 2013)

- Sutriyanti, and Mohamad Muspawi, 'Jenis-Jenis Data Dalam Ilmu Pendidikan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5 (2024), 195–204
- Veršinskas, Tomas, Margret Vidar, Morten Hartvigsen, Kristina Mitic Arsova, Frank van Holst, and Maxim Gorgan, *Legal Guide on Land Consolidation* (Rome: Food And Agriculture Organization of The United Nations, 2020)
- Vries, Walter Timo De, 'Social Aspects in Land Consolidation Processes', 2022
- Widura, Elsa, Asih Retno Dewi, and Wijayanti Hapsari, 'Land Consolidation Policy in Addressing Slums and Tidal Flooding : A Case Study of Kampung Bugisan', *The Journal Of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6.1 (2025), 67–83 <<https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i1.584>>
- Wisamsur, Catherine A, Irvan Trang, and Imelda Ogi, 'Pengaruh Kondisi Kerja Dan Perubahan Organisasi Terhadap Perilaku Kerja Di PT. Pos Indonesia KCU Manado', *Jurnal EMBA*, 12.1, 1096–1105
- Yurmansah, and Mussadun, 'Evaluasi Proses Konsolidasi Tanah Kawasan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Kurau Klaster 1 Desa Kurau Berdasarkan Persepsi Masyarakat', *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 12.1 (2016), 98–111
- Yusuf, Muh Alwy, H Trisnawati, Ardy Abraham, and Hardianti Rukmana, 'Analisis Regresi Linier Sederhana Dan Berganda Beserta Penerapannya', *Journal on Education*, 06.02 (2024), 13331–44